

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD)



**KECAMATAN PANCATENGAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Illahi Robbi, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja pada Perangkat Daerah Kecamatan Pancatengah adalah sebagai dasar dan bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan yang berfungsi sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan implementasi penjabaran dari Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Pancatengah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta indikator kinerja beserta kelompok sasarannya.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pancatengah Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pancatengah pada Tahun 2025.

Pancatengah, 01 Januari 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 LATAR BELAKANG	7
1.2 LANDASAN HUKUM	8
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	10
1.3.1 MAKSUD	10
1.3.2 TUJUAN	11
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PANCATENGAH	13
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022, TAHUN BERJALAN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD 2021-2026	13
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD	27
2.3 ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PANCATENGAH	31

.....	
2.4	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 33
2.5	PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 34
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN RENJA KECAMATAN PANCATENGAH 35
3.1	TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 35
3.2	TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN PANCATENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA .. 35
3.3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN PANCATENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 38
BAB IV	RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 42
BAB V	PENUTUP 69

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN PANCATENGAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN PANCATENGAH S/D TAHUN 2023	12
	2.1.1.REALISASI/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG TIDAK MEMENUHI TARGET KINERJA HASIL/KELUARAN YANG DIRENCANAKAN	20
	2.1.2.REALISASI/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG TELAH MEMENUHI TARGET KINERJA HASIL/KELUARAN YANG DIRENCANAKAN	21
TABEL 2.2	REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN KECAMATAN PANCATENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2022	26
TABEL 2.3	REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN KECAMATAN PANCATENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN BERJALAN S/D BULAN AGUSTUS 2023	29
TABEL 2.4	PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PANCATENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA	32
TABEL 2.5	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2024 KECAMATAN PANCATENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA	40

TABEL 3.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PANCATENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA	51
TABEL 3.2	RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KECAMATAN PANCATENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Pancatengah yaitu ***“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”*** yang menjadi landasan dalam

penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. Sekretariat daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah. Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Pancatengah disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pancatengah Tahun 2024;
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Pancatengah pada Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Pancatengah Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Pancatengah dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Pancatengah Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022, Tahun Berjalan 2023 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan SKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.2 Program dan Kegiatan Kecamatan Pancatengah tahun 2025

BAB IV: PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PANCATENGGAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pancatengah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Pancatengah

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Pancatengah Tahun 2021-2026, tujuan Kecamatan Pancatengah adalah “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran kinerja Kecamatan Pancatengah yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan;
2. Meningkatnya profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Pancatengah
4. Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan Pancatengah

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Pancatengah pada tahun 2024 melaksanakan 5 program yang dijabarkan dalam 10 kegiatan dan diimplementasikan dalam 17 bentuk sub kegiatan. Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pancatengah Tahun 2025 sebagaimana pada tabel 2.1 dan rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

PerangkaT Daerah dan Realisasi Pencapaian Target
Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 pada tabel 2.1.

Tabel. 2.1
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kantor Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN	2.226.482.684	2.055.816,804	92,33
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.731.112.684	1.581.895.304	91,38
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.364.727.684	1.239.579.756	90,83
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.364.727.684	1.239.579.756	90,83
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.395.100	77.717.600	99,50
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.354.100	35.177.600	99,50
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.490.000	5.284.000	96,25
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000	8.370.000	93,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	31.551.000	28.886.000	91,55
7	01	01	2.06	09	Belanja modal peralatan dan mesin	15.000.000	9.950.000	66,33
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.700.000	59.190.748	95,93

7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.500.000	5.990.748	70,48
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.200.000	53.200.000	100,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.289.900	195.457.200	93,84
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.142.000	110.064.700	90,11
7	01	01	2.03	38	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.147.900	85.392.500	99,12
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	245.630.000	241.081.900	96,62
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	208.500.000	204.835.000	96,80
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	208.500.000	204.835.000	96,80
7	01	02	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000	14.116.900	94,11
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00	14.116.900	94,11
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.130.000	22.130.000	100,00
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	22.130.000	21.130.000	100,00

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	197.075.000	181.744.700	92,22
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	197.075.000	181.744.700	92,22
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	197.075.000	181.744.700	92,22
					Koordinasi Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang - undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia			
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.450.000	19.879.900	92,68
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.450.000	19.879.900	92,68
7	01	05	2.01	01	Pembinaan wasbang dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila ,pelaksanaan UUD NKRI ,tahun 1945	21.450.000	19.879.900	92,68
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.215.000	31.215.000	100,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.215.000	31.215.000	100,00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	14.560.000	14.560.000	100,00
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.655.000	16.655.000	100,00

Adapun rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pancatengah Capaian target kinerja keuangan Kecamatan Pancatengah Tahun 2024 mencapai 92,33 %. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja keuangan Kecamatan Pancatengah Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.1 diatas, Pencapaian target Program sebesar 100 % dan hampir semua target kegiatan mencapai target kinerja di atas 90%, ada beberapa kegiatan yang realisasi capaian target kinerja keuangan dibawah 90% diantaranya yaitu kegiatan belanja modal peralatan dan mesin yaitu 66,33 % dan kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 70,48 %.

Capaian target kinerja keuangan Kecamatan Pancatengah Tahun 2024 mencapai 92,33%..Adapun Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pancatengah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pancatengah s/d Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.2.

Tabel 2.2.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PANCATENGAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN PANCATENGAH s/d TAHUN 2024

KABUPATEN TASIKMALAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capala Realisa Targe Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7					KECAMATAN Pancatengah		N/A	-						
7	01				KECAMATAN			-		-	-			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pancatengah	60	-	62	50,25	-	N/A	N/A	0,00%
7	01	001	2.01		Perencanaaa, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	-	N/A	-	-	-	-	0,00%
7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	-	N/A	-	-	-	-	0,00%
7	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	-	N/A	-	-	-	-	0,00%
7	01	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	-	N/A	-	-	-	-	0,00%

7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100	-	N/A	-	-	100	91,80	100,00
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8	-	N/A	90,83	-	210	210	100,00
7	01	001	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	-	-	N/A	-	-	-	-	0,00%
7	01	001	2.03	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	N/A	-	-	-	0	0,00%
7	01	001	2.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	N/A	-	-	-	-	0,00%
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100	-	N/A	-	-	100	87,95	87,95%
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	-	N/A	90,50	-	12	12	100,00
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	-	N/A	96,25	-	12	12	100,00
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	-	N/A	-	-	12	12	100,00
7	01	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	-	N/A	93,00	-	12	12	100,00
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	-	N/A	91,55	-	12	12	100,00
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	-	-	N/A	-	-	-	-	
7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	N/A	-	-	-	-	

7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	-	N/A	-	-	100	100,00	100,00
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	-	N/A	70,48	-	12	94	76,48%
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	-	N/A	100	-	12	12	100,00
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	-	N/A	-	-	100	97,88	97,88%
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	84	-	N/A	-	-	84	84	100,00
7	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	N/A	-	-	-	0	
7	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	2	-	N/A	99,12	-	2	2	100,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pancatengah	82,75		N/A	82,78		83,11	83,11	100,00
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5		N/A			5	4	80,00%
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4		N/A			4	3	72,26%

7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1		N/A		1	1	100,00
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1		N/A		1	5	1,00%
7	01	002	2.02	002	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1		N/A		1	5	500,00
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	1		N/A		1	1	100,00
7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1		N/A		-	-	
7	01	002	2.04	003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		N/A		4	4	100,00
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	N/A		N/A		N/A	N/A	
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa			N/A		-		
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		N/A		-	0	
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100		N/A		100	80,00	80,00%

7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	5		N/A		5	5	100,00
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		N/A		-	-	
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5		N/A		5	4	80,00
7	01	004	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindaklanjuti	-		N/A		-	-	
7	01	004	2.02	001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		N/A		-	-	
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100		N/A		100	100,00	100,00
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100		N/A		100	100,00	100,00

7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5		N/A			5	5,00	100,00
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		N/A			-	0,00	
7	01	005	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			N/A			-		
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100		N/A			100	50,00	50,00%
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100		N/A			100%	50,00	50,00%

7	0	00	2.01	001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		N/A		-	-	
7	0	00	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		N/A		-	-	
7	0	00	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7		N/A		0	0	0,00%
7	0	00	2.01	006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		N/A		-	-	
7	0	00	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7		N/A		7	7	100,00

Berdasarkan tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian target Tahun 2022 dan 2023 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan Tahun 2024 sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun hasil capaian realisasi program dan kegiatan s/d Bulan Desember 2024 sebagai berikut :

2.2.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak dan atau memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 92,33 %;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 90,38 %;
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 99,50%;
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 95,93%;
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 93,84%.

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public dengan kegiatan yaitu :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebesar 96,80%;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan sebesar 94,11 %

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama ,ras,dan golongan lainnya ,guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional sebesar 92,68 %

2.2.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

1. Program Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yaitu :

A Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 100 %

- b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang mendekati 100%

Berdasarkan penjelasan diatas, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program dan kegiatan disebabkan karena kegiatan sudah selesai, jadi ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan seluruhnya. Selain itu juga ada kegiatan yang tidak dianggarkan dalam KUAPPAS, yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, walaupun kegiatannya tetap dilaksanakan karena kegiatan ini merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan Kecamatan Pancatengah.Oleh karena diharapkan untuk tahun kedepan BPKPD harus menganggarkan dalam KUAPPAS.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, bahwa dalam mencapai kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pancatengah berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, bahwa Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan

- c. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
- h. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- i. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Pancatengah merupakan Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, artinya bahwa tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Pancatengah, baik yang terkait dengan pelayanan Administrasi Surat Menyurat, fasilitasi kegiatan social ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pancatengah dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut ini.

Tabel. 2.3.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PANCATENGGAH KABUPATEN TASIKMALAYA

No.	Indikator Kinerja (IKU/SPM/IKK/SDG's)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi	Proyeksi Realisasi			Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025		2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pancatengah		N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	50,25	60 (CC)	62 (CC)	62 (B)	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pancatengah		83,50	83,75	84,00	85,15	82,71	82,75	83,11	83,75	
3	Persentase peningkatan Status Desa		N/A	22%	22%	N/A	N/A	22%	22%	N/A	
4	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti		100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani		100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan		100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dari tabel 2.3.diatas capaian indikator sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pancatengah Tahun 2024, tidak terealisasi seluruhnya, dan tidak dilaksanakan seluruhnya. Sedangkan untuk penyusunan Renja Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga ada perbedaan indikator sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Pancatengah sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Tasikmalaya. Kecamatan Pancatengah masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain

- a) Sistem kerja yang belum optimal;
- b) keterbatasan keterampilan, kompetensi dan kuantitas SDM / pegawai;
- c) Keterbatasan sarana prasarana pelayanan dan kearsipan.

2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pancatengah ditentukan isu-isu strategis yaitu sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Pancatengah, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.
5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan

membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud.

2.4. Review terhadap Rancangan SKPD

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisa efisiensi dengan cara membandingkan antara input, output dan outcome baik untuk rencana kegiatan maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi Kecamatan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro. Indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pancatengah dan partisipasi sektor swasta (masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang ditetapkan. Capaian indikator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kecamatan Pancatengah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada Masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN RENJA KECAMATAN PANCATENGAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan RENSTRA, sedangkan Renja Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Pancatengah Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Pancatengah merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam

Selanjutnya Prioritas dan Sasaran Kecamatan Pancatengah selama periode tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Kecamatan Pancatengah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (Outcome)
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi		
		Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Pancatengah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pancatengah
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Pancatengah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pancatengah
				Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Pancatengah	Persentase peningkatan Status Desa
				Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Pancatengah	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti
					Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani
					Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Tabel 3.2.

Tujuan-Sasaran Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya

N o.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-	
				2022	2023	2024
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Pancatengah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Pancatengah	59 (CC)	60 (CC)	62 (B)
		2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Pancatengah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pancatengah	82,61	82,71	82,75
		3 Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Pancatengah	Persentase peningkatan Status Desa	22%	22%	22%
		4 Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Pancatengah	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
			Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertanganl	100%	100%	100%
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%

Dari Prioritas dan Sasaran tersebut diatas diharapkan fungsi Kecamatan Pancatengah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan semakin optimal, sehingga visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya akan terwujud.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pancatengah Tahun Anggaran 2025

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pancatengah tahun anggaran 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah.

Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output, outcome* dan *benefit* yang sesuai dengan target sebagai syarat tercapainya tujuan

Kecamatan Pancatengah. Secara lebih lengkap rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 diinput dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan SIMDA Pink yaitu sebesar Rp. 1.875.640.694,00 dengan rincian uraian kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel 3.2.

**RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN PANCATENGGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Urusan	Kode				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RKPD 2025
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
7					KECAMATAN PANCATENGGAH	1.875.640.694
7	01				KECAMATAN	1.875.640.694
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.554.170.694
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
7	1	1	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.331.132.694
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.331.132.694
7	1	1	2.02		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	
7	1	1	2.02	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Pancatengah <i>Pancatengah</i>)	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.055.500
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.072.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.733.500
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.250.000

7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
7	1	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	
7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
7	1	1	2.07	06	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.200.500
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.500
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.200.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.782.000
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	62.782.000
7	1	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
7	01	01	2.03	38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	62.130.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.000.000
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15.000.000
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	22.130.000
7	1	2	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	22.130.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	203.125.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	203.125.000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	203.125.000
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda	

					Koordinasi Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang - undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000
7	01	05	2.01		Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku ,umat beragama, Ras , dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal ,regional dan nasional	25.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.215.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.215.000
7	1	6	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.560.000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.655.000

Tabel 4.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PANCATENGGAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Unit Pen Jawab
		Capalan Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capalan Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumb er Dana		Target Capalan Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Targ et		
	Kecamatan Pancatengah														
	Unsur Kewilayahan														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A				Kec.Panc atengah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A			1.564.170.694	DAU			1.693.102.326		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kec.Panc atengah							Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat	7 Doku men		Kasubag

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
					Kec.Panc atengah							2 laporan	15.000.000	Kasubag
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kec.Panc atengah						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000	Kasubag
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.331.132.694		DAU				

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/bulan	Kec.Pancatengah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/bulan	1.331.132.694	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/bulan	1.693.102.326	Kasubag
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah			82.055.500	DAU				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kec.Pancatengah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.072.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.412.000	Kasubag
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kec.Pancatengah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.733.500	DAU	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.500.000	Kasubag

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kec.Panc atengah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Paket	2.000.000		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.025.000	Umpeg
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kec.Panc atengah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Paket	6.000.000	DAU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.985.000	umpeg
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kec.Panc atengah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket	28.250.000	DAU	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	31.350.000	Umpeg
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													

	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		KecPanca tengah					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kec.Panc atengah					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	35.500.000	umpeg
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kec.Panc atengah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000	DAU	12 Laporan	15.000.000	Keuang:

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kec.Panc atengah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	53.200.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28.000.000	Keuangt
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			77.762.000	DAU				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Kec.Panc atengah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	62.762.000	DAU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		Umpeg

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kec.Panc atengah					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	5.000.000	Umpeg
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DI rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kec.Panc atengah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	15.000.000	DAU	2 Unit		Umpeg
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			62.130.000	DAU			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			25.000.000	DAU			

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaa n dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintah an dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordina si/Sinergi Perencan aan dan Pelaksan aan Kegiatan Pemerint ahan dengan Perangka t Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan			Jumlah Laporan Koordin asi/Sine rgi Perenca naan dan Pelaksa naan Kegiata n Pemerin tahan dengan Perangk at Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
					KecPanca tengah				25.000.000	DAU		12 Laporan	35.000.000	Kasi Kes
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				DAU				

	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			
									15.000.000	DAU		1 Laporan	25.000.000	Kesra
					Kec. Pancaten gah									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				DAU				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Kec. Pancaten gah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
									22.130.000	DAU		4 Laporan	25.000.000	PMDEP
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa													
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Kec. Pancatengah						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		
													10.000.000	PMDEP
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			203.125.000					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			203.125.000	DAU				

	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Kec. Pancaten gah	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		203.125.000	DAU		1 Laporan	250.000.000	Kesra
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				25.000.000	DAU				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				25.000.000	DAU				

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Kec. Pancatengah	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	203.125.000	DAU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	250.000.000	Kesra
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			25.000.000	DAU				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			25.000.000	DAU				

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 orang	Kec. Pancatengah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	25.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	35.000.000	Kesra
---	---	---	-----------	------------------	---	---	-----------	------------	---	-----------	------------	-------

[illegible]

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	Kec. Pancaten gah						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	10.000.000	Kesra
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			31.215.000	DAU				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				DAU				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	Kec. Pancaten gah	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	14.560.000	DAU	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	22.000.000	Kasi Per

	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangu nan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaa n Pembangu nan Partisipatif	11 Dokumen	Kec. Pancaten gah	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencan aan Pembang unan Partisipat if	11 Dokumen	16.655.000	DAU	Jumlah Dokume n Fasillitasi dalam rangka Perenca naan Pemban gunan Partisip atif	11 Dokumen	17.630.000	PMDEP
--	--	---	--	---------------	-------------------------	--	--	---------------	------------	-----	---	---------------	------------	-------

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pancatengah tahun Anggaran 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala pemerintahan kabupaten yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Rencana Kerja memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Aparatur Kecamatan Pancatengah Tahun 2025. Kecamatan Pancatengah sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pancatengah Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Pancatengah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Pancatengah yang telah dirumuskan dan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Pancatengah. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Pancatengah.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu ***“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”***

Pancatengah, 02 Januari 2025



NIP. 197409092006041006